

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia "Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya"*. Kencana Prenadamedia Group.
- Radbruch, G. (2012). *Filsafat Hukum (Dalam S. Rahardjo, Ilmu Hukum)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir (Memuat konsep Jan Michiel Otto)*. Refika Aditama.
- Simbolon, A. (2018). *Hukum Persaingan Usaha*. Liberty Yogyakarta.
- Sitompul, A. (1999). *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Citra Aditya Bakti.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

Skripsi/Tesis

- Febriani, N. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Dirugikan Akibat Persekongkolan Menetapkan Pemenang Tender (Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2021)* (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Karmila, F. (2025). *Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024)* (Skripsi tidak diterbitkan). *Note: Silakan lengkapi nama universitas asal skripsi Fayu Karmila.*
- Pone, R. D. P. (2025). *Problematik yuridis terhadap pembayaran royalti lagu pada pencipta berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Repositori Institusi). Universitas Katolik Widya Mandira. <https://repositori.unwira.ac.id/20960/>

Jurnal

- Anindyajati, T. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap praktek persekongkolan tender. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 349–369.

- Arafah, I., & Hikmah, F. (2024). Analisis prinsip kepastian hukum dalam pengalihan rahasia dagang di Indonesia. *UIR Law Review*, 8(1), 1–15. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/16540>
- Arivandi, M. V., Ramadani, N. D., Rohma, N., Putri, R. Y., & Puspasari, E. Y. (2024). Implikasi hukum dan etika dalam kasus pelanggaran rahasia dagang: Studi kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(4), 233–246. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i4.1013>
- Aslinda, N. (2024). Tinjauan hukum terhadap persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Referendum: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(4), 215–229.
- Benia, E. (2022). Analisis perlindungan hukum rahasia dagang pada perjanjian waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 125–142. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1017>
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum* (atau nama jurnal terkait), volume(issue), halaman. *Note: Silakan lengkapi nama jurnal dan volumenya jika masih ada.*
- Mayva, V., & Anggraeni, A. M. T. (2024). Eksaminasi putusan KPPU mengenai rahasia perusahaan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Persaingan Usaha* (atau nama jurnal terkait), volume(issue), halaman.
- Pally, H. (2022). Perlindungan hukum bagi karyawan yang membeli rumah dengan mekanisme potong gaji. *Lex Privatum*, 10(2), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/40369>
- Pratiwi, A. R. (2024). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(1), 45–57. STIH Awang Long. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1417>
- Ridwan, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan di Indonesia. *Varia Hukum*, 3(1), halaman. *Note: Jalankan cross-check halaman jika artikel ini berbeda dengan tulisan Sri Hidayanti & Muanif Ridwan.*
- Sugiawan, F. A., & Rahaditya, R. (2025). Non-Disclosure Agreement sebagai instrumen perlindungan rahasia dagang dalam keseimbangan hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), halaman. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7428>
- Wulandari, M., Ramadani, F., Athira, J., Khairunnisa, A., Anggraini, K., Awaliyah, D. P., Zahira, N. A., Wulandari, P. A., Wardani, V. S., & Mayliyanti, D. F. (2025). Analisis yuridis persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia (Studi kasus: Putusan No. 08/KPPU-L/2024). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2515–2524.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Fyo Akbar Putra Frefy, 2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PEMILIK RAHASIA PERUSAHAAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERSEKONGKOLAN

Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2007). *Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007*.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2010). *Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010*.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2025).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016*.
- Pengadilan Tinggi Bandung. (2023). *Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 176/PDT/2023/PT BDG*.

Sumber lainnya

- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2026, Mei 3). *Info perlindungan hukum Indonesia: Pengertian, aspek, unsur, dan contoh*. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/info-perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan 2023*. KPPU RI.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. (Tahun Terbit). *Pedoman Pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan*.